

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP  
SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ATAS PENGAJUAN  
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA  
(Studi pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun)**

**Putri Santi Yudhawati  
Achmad Husaini**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email : putrishantyyudhawati@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to understand about the internal control system towards the submission of life insurance claim payment and to know the internal control system to accounting system of cash expenditure on submission of life insurance claim payment. The type of the research that will be used in this study is a descriptive method. This study also focuses on the organizational structure which separates the functional responsibility appropriately, authority system and the recording procedure which give a sufficient protection towards wealth, debt, income, cost, well-practice in terms of undergoing the duty in each organization unit, and the staff that appropriate with his/her responsibility. The result of this study shows that internal control system towards the system of submission of life insurance claim payment and accounting cash expenditure system to submission of life insurance claim payment have done well. However, there is a weakness in the implementation which can create a disadvantage to the company.*

**Key Word : Internal Control, Accounting System, Cash**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sistem pengendalian intern terhadap sistem pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa dan Mengetahui sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas atas pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, fokus penelitian adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap unit organisasi, dan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap sistem pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa dan sisem akuntansi pengeluaara kas atas pengajuan pembayaran klaim asuransi jjwa sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

**Kata Kunci : Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi, Kas**

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengantisipasi resiko yang menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang. Risiko-risiko tersebut dapat berupa kecelakaan, kematian, sakit dan risiko lainnya, akan tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya asuransi tersebut. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang kebingungan setelah terjadi hal yang tidak di inginkan, oleh karena itu, perusahaan asuransi mengambil alih dan mengantisipasi hal yang mungkin terjadi dimasa depan melalui program-program yang ditawarkan sesuai dengan tujuannya.

Global Medical Trends Report dari Towers Watson menyatakan rata-rata kenaikan biaya pengobatan di Indonesia sepanjang tahun 2009-2011 naik dari 10,7% menjadi 13,55% per tahunnya. Padahal, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik untuk tahun 2011-2012, kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia hanya 1,2% tiap tahun. Bisa ditebak, ada kesenjangan yang lebar antara kebutuhan kesehatan dan ketersediaan dana. Alhasil, masyarakat perlu mengelola keuangannya dengan baik supaya bisa menopang biaya kesehatan yang kian tinggi ([www.swa.co.id](http://www.swa.co.id)). Fenomena ini membuat adanya jasa perasuransian semakin dibutuhkan keberadaannya, karna tidak hanya memberikan rasa aman dan perlindungan dari risiko asuransi juga sebagai sarana tata kelola *financial* rumah tangga.

Karakteristik khas yang membedakan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan pada umumnya adalah klaim. Klaim merupakan permintaan resmi nasabah kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa, misalnya nasabah tersebut mengalami kecelakaan, pemegang polis meninggal dunia atau polis tersebut telah habis kontrak. Pada klaim habis kontrak, uang klaim akan dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan kurun waktu yang sudah disepakati pada polis asuransi.

Sistem dan prosedur dalam pengajuan pembayaran klaim asuransi merupakan sistem yang cukup rawan dan menimbulkan kerumitan tersendiri, oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem akuntansi yang baik dalam perusahaan asuransi. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan

asuransi harus memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern yang dapat menjaga keamanan hak-hak milik perusahaan dan nasabah.

Sistem pembayaran klaim memerlukan sistem pengendalian intern yang baik. Pengendalian yang baik akan membantu menghindari penyimpangan atau kecurangan dalam proses pembayaran klaim, dimana pembayaran klaim adalah hal yang dibutuhkan nasabah jika terjadi suatu peristiwa yang menimpa. Sistem pengendalian intern “meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen” (Mulyadi, 2010:163).

Perusahaan harus mampu mempunyai unsur-unsur yang mendukung pengendalian intern karena hal tersebut termasuk salah satu bagian terpenting dalam perusahaan. Unsur-unsur tersebut, yaitu “struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam memisahkan tugas dan fungsi setiap unit organisasi” (Mulyadi, 2010:164). Unsur-unsur pokok tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan pengendalian intern yang baik.

Pembayaran klaim berhubungan dengan pengeluaran kas. Kas merupakan unsur vital pada perusahaan, karna kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid dan paling mudah disalahgunakan. Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif menjadi suatu keharusan untuk melindungi kas dan menjaga keakuratan catatan akuntansi untuk kas.

Tujuan diadakan pengendalian intern agar hal-hal yang merugikan perusahaan dapat dihindari dan tetap menjaga nilai-nilai dari suatu perusahaan. Pada akhirnya hal-hal yang merugikan akan mempengaruhi dan merugikan posisi keuangan. Pengendalian intern yang baik diharapkan mampu menunjang pembayaran klaim yang baik pula, sehingga citra perusahaan akan dipandang baik oleh masyarakat, bisa meningkatkan jumlah polis seiring dengan perubahan asumsi masyarakat terhadap pandangan sebelumnya bahwa asuransi dirasa merugikan.

PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa. Alasan utama pemilihan perusahaan adalah karena PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia yang sampai sekarang masih eksis keberadaannya. PT Asuransi Jiwasraya membukukan hasil investasi yang didapat mencapai Rp 1,9 triliun serta aset yang dimiliki sebesar Rp 15 triliun. Akan tetapi, dibalik kesuksesannya masih terdapat keluhan dari nasabah atau pihak tertanggung mengenai pembayaran klaim yang diterima tidak dengan semestinya nasabah mendapatkan kerugian akibat penurunan nilai unit yang tidak masuk akal, disamping itu perusahaan juga tidak transparan memberikan informasi mengenai perjanjian yang disepakati antara tertanggung dan penanggung (www.kompasiana.com).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Sistem Akuntansi

#### 2.1.1. Pengertian Sistem Akuntansi

“Sistem akuntansi adalah pengorganisasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang dalam hal ini adalah jurnal, dan laporan dari tiap-tiap bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen (Maulinarhadi, 2010:1). Pada pendapat lain dijelaskan “sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini apakah secara manual/terkomputerisasi” (Sutabri, 2004:6).

#### 2.1.2. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi

Tujuan pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

- Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
- Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
- Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
- Untuk mengurangi biaya klerikal dalam (Mulyadi, 2010:20)

#### 2.1.3. Fungsi Sistem Akuntansi

Fungsi penting yang dibentuk sistem akuntansi pada sebuah organisasi antara lain:

- Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
- Sub sistem sistem akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

(Maulinarhadi, 2012:7)

#### 2.1.4. Unsur Sistem Akuntansi

Maulinarhadi (2012:9-15) menjelaskan terdapat lima unsur pokok dari sistem akuntansi, yaitu:

- Formulir atau dokumen. Merupakan unsur sistem akuntansi yang pertama, karena dalam pelaksanaan transaksi ekonomi di dalam sebuah perusahaan dibutuhkan suatu bukti atau dokumen (tertulis maupun bentuk elektronik) sumber untuk dapat diproses secara akuntansi menjadi sebuah laporan.
- Catatan atau jurnal. Catatan kronologis dari transaksi yang berisikan tanggal, kode akun yang akan didebet atau dikredit beserta jumlahnya, dan keterangan dari transaksi tersebut.
- Pembukuan. Buku besar terdiri dari buku besar dan buku besar pembantu.
- Laporan. Laporan sebagai output sistem akuntansi.
- Prosedur dan control. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan.

## 2.2. Sistem Pengendalian Intern

### 2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Nugroho berpendapat bahwa, pengendalian intern (*internal control*) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi (Nugroho, 2001:18).

### 2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Baridwan tujuan dari pengendalian intern adalah:

- a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- c. Memajukan efisiensi dalam oprasi.
- d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu.

(Baridwan, 2012:9).

### **2.2.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Suatu sistem pengendalian intern yang memuaskan harus meliputi:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-tanggung jawab fungsional secara tepat.
- b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan dan biaya-biaya.
- c. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
- d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan-pengawasan tambahan

(Baridwan, 2012:4)

### **2.2.4. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern**

Faktor-faktor yang membatasi bekerjanya suatu sistem pengendalain intern adalah:

- a. Kesalahan dalam judgement  
Manajemen atau personel lain mungkin memberikan judgement yang salah dalam pengambilan keputusan atau dalam menyusun tugas-tugas rutin yang dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi, terbatasnya waktu dan tekanan-tekanan.
- b. Kegagalan  
Kegagalan ini dapat diakibatkan karena kesalahpahaman antar personel atau karna kecerobohan dan ketidak hati-hatian didalam menjalankan tugas.
- c. Kolusi  
Fungsi yang ada didalam organisasi yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh satu individu, diserahkan pada bagian satu individu atau satu bagian saja yang kemudian melakukan tindakan kolusi dengan baik dengan pegawai yang lain, konsumen maupun supplier sehingga data keuangan yang tercermin tidak menunjukkan fakta yang sesungguhnya.

- d. Pelanggaran manajemen  
Manajemen dalam melanggar kebijakan yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merekayasa data keuangan.
  - e. Cost of benefit  
untuk pengendalian intern hendaknya jangan melebihi benefit yang diharapkan diperoleh.
- (Mulyadi, 2010:181)

## **2.3. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

### **2.3.1. Pengertian Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Sistem pengeluaran kas merupakan kewajiban perusahaan yang timbul akibat aktivitas suatu perusahaan. “Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditur yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo” (Hall, 2007:330).

### **2.3.2. Fungsi Yang Terkait Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Fungsi yang terkait dengan sistem pengeluaran kas dengan cek adalah:

- a. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.
- b. Fungsi kas.
- c. Fungsi akuntansi.
- d. Fungsi pemeriksaan intern.

(Mulyadi, 2010:513)

### **2.3.3. Dokumen Yang Digunakan Pada Saat Sistem Akuntansi**

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah Bukti kas keluar, Cek dan Permintaan cek (Mulyadi, 2010:510).

### **2.3.4. Catatan Yang Digunakan Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah Jurnal pengeluaran kas (*cash disburmenst journal*) dan Register cek (*check register*) (Mulyadi, 2010:513).

### **2.3.5. Unsur Pengendalian Intern Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Kas pada suatu perusahaan perlu diperhatikan pengawasannya, karna kas adalah kekayaan perusahaan yang paling mudah disalahgunakan. Suatu sistem pengeluaran kas yang ditetapkan perusahaan harus memiliki unsur-unsur pengendalian intern agar tujuan pokok perusahaan mengenai sistem akuntansi pengeluaranm kas dapat

berjalan dengan baik. Unsur-unsur dari sistem pengendalian intern akuntansi pengeluaran kas yaitu Organisasi, Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan Praktik yang sehat (Mulyadi, 2010:517).

## 2.4. Asuransi

### 2.4.1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No.2/1992) sebagai berikut:

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengakibatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Yang dimaksud “penanggung” dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan UU No.2/1992.

### 2.4.2. Tujuan Asuransi

Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Begitu juga dengan perusahaan asuransi, berikut dijelaskan beberapa tujuan asuransi:

- a. Teori pengalihan risiko  
Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya.
- b. Pembayaran ganti rugi  
Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.
- c. Pembayaran santunan  
Apabila tertanggung mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari

penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang.

#### d. Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berhimpunan dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi kepada perkumpulan, maka perkumpulan ini berkedudukan sebagian penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung.

(Abdulkadir, 2011:12)

## 2.5. Asuransi Jiwa

### 2.5.1. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu alat sosial dan ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (*premature death*) dari anggota-anggota kelompok itu. Ditinjau dari sudut pandang perseorangan, asuransi jiwa adalah suatu metode untuk menciptakan suatu estate, suatu metode untuk menjaga agar rencana untuk menghimpun harta untuk kepentingan orang lain (terutama keluarganya) dapat terwujud, baik kepala keluarga (*breadwinner*) meninggal sebelum waktunya (*prematurely*) maupun hidup sampai tua bangka. Perkataan estate seringkali digambarkan sebagai seluruh harta kepunyaan orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, arti perkataan estate sebenarnya lebih luas. Di sini diartikan seluruh harta termasuk harta yang mendatangkan penghasilan, baik harta itu akan digunakan sebelum meninggalnya seseorang maupun sesudahnya (Hasyim, 2002:75).

### 2.5.2. Tujuan Asuransi Jiwa

Hasyim menjelaskan tujuan asuransi jiwa ada dua yaitu:

- a. Menjamin adanya suatu estate dari mana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga meninggal dunia.
- b. Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan di masa depan.

(Hasyim: 2002:76)

## 2.6. Polis

### 2.6.1. Pengertian Polis

Kegiatan kerjasama yang melibatkan lebih beberapa pihak ada kalanya memerlukan kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian ini biasanya

dituangkan dalam sebuah dokumen. Dalam asuransi, dokumen yang berisikan kontrak atau perjanjian disebut dengan polis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Ia dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit. Atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang jelimet yang tiga inci tebalnya” (Hasyim: 2002:110).

### **2.6.2. Fungsi Polis**

Polis berfungsi sebagai “alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung” (Abdulkadir: 2012:59).

### **2.6.3. Isi Polis**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut pula polis. Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat:

- a. Hari diadakan asuransi.
- b. Nama tertanggung.
- c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan.
- d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen.
- e. Jumlah asuransi.
- f. Premi asuransi.

## **2.7. Klaim**

Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami dengan memberikan sejumlah uang.

### **2.7.1. Syarat-syarat pembayaran klaim**

Setiap pembayaran klaim harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi:

- a. Polis sah.
- b. Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi.
- c. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- d. Melampiri surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
- e. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
- f. Khusus klaim meninggal dunia harus dilengkapi dengan mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan perusahaan asuransi.
- g. Surat kematian dari instansi pemerintah.

- h. Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal.
- i. Surat keterangan dari polis bila meninggal karena kecelakaan.  
(Abdulkadir, 2006:282)

## **3. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif atau *descriptive research*. Penelitian ini dilaksanakan di PT Asuransi Jiwasraya yang bertempat di JL. Dr. Soetomo No 44, Madiun, Jawa Timur 63116. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi serta instrumen penelitian dilakukan berdasarkan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Adapun beberapa tahap analisis yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis sistem pengendalian intern terhadap sistem pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Analisis Pengendalian Intern Sistem Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun**

#### **4.1.1. Struktur Organisasi**

PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun telah menggunakan struktur organisasi yang sudah baik.

- 1) Posisi Kepala Cabang (KACAB) yang langsung membawahi Kasi Pertanggung, Kasi Oprasional dan Kasi Administrasi memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan dan dapat secara langsung memberikan perintah yang menunjang keberlangsungan perusahaan.
- 2) Fungsi operasi sudah terpisah dari fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Kasi Pertanggung sebagai fungsi oprasi yaitu dengan melakukan pelayanan klaim, Kasi Administrasi bertugas sebagai fungsi akuntansi dan Kasir sebagai fungsi penyimpanan.

3) Proses pengajuan klaim PT Asuransi Jiwasraya tidak di kerjakan oleh satu fungsi saja, tetapi ada campur tangan dari berbagai fungsi yang terkait.

Secara keseluruhan struktur organisasi yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun sudah sangat baik. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan struktur organisasi ini, seperti lebih cepat dalam mengambil keputusan dan dalam pemberian perintah atau wewenang. Meskipun sudah baik, namun masih ada kekurangan yang bisa diperbaiki. Pada bagian Kasi Pertanggungjawaban lebih baik dibentuk satu fungsi khusus yang bertugas khusus untuk melakukan *survey* dilapangan sehingga keabsahan dari berkas yang diajukan tidak terjadi kesalahan, terutama pada pengajuan klaim meninggal dan rawat inap yang rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada Kasi Administrasi pembukuan sebaiknya dilakukan apabila semua transaksi sudah selesai, agar dapat meminimalisir jika ada terjadi kesalahan.

#### **4.1.2. Sistem Wewenang dan Otorisasi**

Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan PT Asuransi Jiwasraya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Terbukti dengan setiap proses otorisasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diotorisasi dengan pejabat yang berwenang. Sistem otorisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Form pengajuan klaim yang dibuat oleh pemegang polis/yang ditunjuk diotorisasi dengan agen terkait, Kasi Administrasi dan Kepala Cabang (KACAB).
- 2) Laporan penyelidikan klaim meninggal dan klaim rawat inap diotorisasi oleh Kasi Administrasi dan Kepala Cabang (KACAB).
- 3) Pembuatan bukti pembayaran, voucher, cek dan nota transfer diotorisasi oleh Kasi Administrasi.

#### **4.1.3. Praktik Yang Sehat**

- 1) Penggunaan formulir bernomor tercetak. Tidak semua formulir yang digunakan oleh PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun memiliki nomor urut tercetak. Masih ada beberapa dokumen yang nomor urutnya dilakukan secara manual. Hal ini dapat menjadi sesuatu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.
- 2) Setiap proses transaksi pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa tidak dilakukan oleh satu orang atau satu fungsi organisasi dari awal hingga transaksi selesai. Setiap transaksi dilakukan oleh

bagian-bagian yang telah diberikan kewenangan atau sesuai dengan job disk yang sudah dibentuk.

#### **3) Perputaran Jabatan**

PT Asuransi Jiwasraya telah melaksanakan perputaran jabatan yang dilakukan oleh karyawan. Karyawan akan dipindah tugaskan dari Kantor Cabang satu ke Kantor Cabang yang lain secara periodik menurut jangka waktu tertentu.

#### **4) Pemeriksaan mendadak**

Pemeriksaan secara mendadak dilakukan oleh bagian internal perusahaan diperiksa langsung oleh Kepala Cabang (KACAB), selain itu dalam jangka waktu tertentu juga diperiksa oleh Kantor Wilayah. Tujuannya untuk memeriksa kinerja pada Kantor Cabang sudah berjalan dengan baik atau tidak.

- 5) Surat Ijin Pembayaran (SIP) yang diotorisasi oleh Kasi Administrasi dan diperiksa keabsahannya oleh Kepala Cabang terkadang tidak sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesalahan jika tidak diteliti.

#### **4.1.4. Karyawan Yang Sesuai dengan Kompeten**

PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kompeten telah melakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Melakukan penerimaan karyawan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan sehingga menghasilkan karyawan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dituntut mempunyai keahlian di dalam bidangnya.
- 2) Karyawan telah melakukan tugasnya dengan baik dan setiap karyawan satu dengan yang lainnya telah memberikan kepercayaan terhadap tugas dari masing-masing, sehingga dapat berkerjasama dengan efektif.
- 3) Pengembangan pendidikan bagi karyawan yang diperintah oleh perusahaan untuk mengembangkan pendidikannya
- 4) Dalam pelaksanaannya terdapat salah satu karyawan yang tidak memenuhi prosedur perusahaan. Karyawan tersebut tidak transparan dalam memberikan syarat-syarat umum asuransi kepada nasabah. Hal tersebut dapat merugikan jika tidak mendapat perhatian khusus dari Branch Offic.

Karyawan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Sistem yang sudah dibentuk dan dijalankan tidak akan berjalan dengan baik apabila

karyawan memiliki kualitas yang buruk, karna karyawan adalah orang yang akan menjalankan sistem tersebut.

## **4.2. Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun**

### **4.2.1. Struktur Organisasi**

Pemisahan fungsi pada sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi jiwa dinilai sudah cukup baik dan memenuhi unsur pengendalian intern. Pemisahan fungsi tersebut adalah:

- 1) Fungsi penyimpanan kas terpisah dengan fungsi akuntansi. Pada struktur organisasi PT Asuransi Jiwasraya fungsi penyimpana kas yaitu kasir sudah terpisah dengan fungsi akuntansi. Kasir hanya melakukan penyimpanan dan Kasi Administrasi melakukan pembukuan.
- 2) Transaksi pengeluaran kas dari awal hingga akhir tidak dilakukan oleh satu fungsi saja tanpa ada campur tangan fungsi lain. Pada sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya, transaksinya dilakukan oleh Kasi Administrasi yang mendapatkan otorisasi dari Kepala Cabang (KACAB).

### **4.2.2. Sistem Wewenang dan Otorisasi**

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada pengeluaran kas PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern. Sistem otorisasi dan prosedur tersebut adalah:

- 1) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Surat Ijin Pembayaran (SIP) dibuat oleh Kasi Administrasi dan diotorisasi oleh Kasi Administrasi serta Kepala Cabang (KACAB). Setelah Kasi Administrasi melakukan transfer pembayaran klaim, Kasi Administrasi langsung melakukan pembukuan pengeluaran kas secara manual dan sistem, setelah semua transaksi selesai semua berkas diserahkan kepada Kasi Pertanggungungan untuk diarsipkan sebagai dokumen perusahaan dan agar polis dapat diperbarui statusnya.
- 2) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pada PT

Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun pencatatan pengeluaran kas sudah didasarkan dari dokumen yang mendukung seperti Surat Ijin Pembayaran (SIP) dan Slip Penerimaan dimana dokumen tersebut mendukung pencatatan pengeluaran kas.

### **4.2.3. Praktik Yang Sehat**

Praktik yang sehat pada sistem pengeluaran kas PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun adalah:

- 1) Saldo kas yang ada ditangan hanya bernilai Rp 1.000.000 jika ada transaksi lain yang membuat perusahaan menyimpan uang lebih banyak maka kasir harus menyimpan di bank.
- 2) Dokumen dasar dalam pengeluaran kas sudah dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasir setelah transaksi pengeluaran kas selesai.
- 3) Semua pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dengan cek atas nama perusahaan. Semua transaksi sudah dilakukan dengan transfer bank, dan meminimalisir melakukan pembayaran atau penerimaan secara cash. Surat Ijin Pembayaran (SIP) yang dibuat sudah sesuai dengan nominal yang dihitung dan ditetapkan pada perhitungan pembayaran klaim.
- 4) Pembukuan pengeluaran kas yang terjadi sudah dilakukan secara manual dan sistem atau komputerisasi.
- 5) Kasir diasuransikan. Kerugian yang terjadi dalam perusahaan dapat dihindari dengan mengasuransikan karyawan tersebut agar dapat menjamin penggantian kerugian yang timbul akibat kecurangan yang mungkin terjadi.
- 6) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan. Setiap nomor pada formulir yang menjadi bagian dari transaksi pengeluaran kas dipertanggungjawabkan oleh bagian Kasir.

### **4.2.4. Karyawan Yang Sesuai Dengan Kompeten**

Dalam transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim PT Asuransi Jiwasraya memiliki karyawan yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Setiap karyawan satu dengan yang lainnya telah memberikan kepercayaan terhadap tugas dari masing-masing, sehingga dapat bekerjasama dengan efektif. Karyawan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Sistem yang sudah dibentuk dan dijalankan tidak akan berjalan dengan baik apabila karyawan memiliki

kualitas yang buruk, karna karyawan adalah orang yang akan menjalankan sistem tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas atas pengajuan pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Madiun sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang ada. Masih terdapat nasabah yang nilai klaimnya tidak sesuai dengan polis dan perusahaan tidak transparan memberikan informasi mengenai perjanjian yang disepakati antara tertanggung dan penanggung membuat proses pengajuan pembayaran klaim kurang berjalan dengan baik.

### 5.2. Saran

1. Sistem wewenang pada setiap fungsi pada struktur organisasi diberikan rincian job description secara jelas.
2. Pemisahan pada bagian Kasi Pertanggung atas fungsi penerimaan pengajuan klaim dan fungsi survey pengajuan klaim.
3. Sistem wewenang dan otorisasi harus dijalankan sesuai dengan prosedur perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anonim. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, Asuransi, dan Pertanggungan*. Jakarta.
- Ali, Hasyim. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan, Prosedur, dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Hall, James A. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulinarhadi, Mirza & Max Advian. *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang: Penerbit Elektronik Pertama dan Tebesar di Indonesia.
- Mulyadi. 2002. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, Ari. 2011. *Seluk Beluk Perusahaan Asuransi*. Sleman: PT Intan Sejati Klaten.

Sutabri, Tata. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.

### Internet :

Anonim. Menopang Biaya Kesehatan Yang Kian Tinggi. Diakses tanggal 10 Desember dari [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id).

Cecen Core, Keluhan Karena Dirugikan Asuransi Investasi Jiwasraya. Diakses pada tanggal 19 Februari dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).